**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

**(RPJMDes)**

****

**DESA JATISUKO**

**KECAMATAN JATIPURO**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**TAHUN 2019 - 2025**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA JATISUKO KECAMATAN JATIPURO**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

 **KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJMDes )**

 **TAHUN 2019 - 2025**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATISUKO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa; |
|  |  | b. | bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); |
|  |  | c. | bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatisuko Tahun 2019-2025; |
|  |  | d. | Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDes 2019-2025 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDesa 2019-2025; |
|  |  | e. | Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD. |
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) |
|  |  | 2. | peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
|  |  | 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; |
|  |  | 5. | Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagamana sudfah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 20);  |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; |
|  |  | 10. | Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa; |
|  |  | 11. | Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; |
|  |  | 12. | Peraturan Daerah Kabupaten 10 Nomor tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahunmm 2019-2023; |
|  |  | 13. | Peraturan Bupati Karanganyar nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembanguan Desa; |
|  |  | 14. | Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menetapkan**  | **:** |  |
| KESATU | : | MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2019–2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA. |
| KEDUA  | : | MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2019-2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA |
| KETIGA | : | KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN |
|  | Disepakati di JatisukoPada Tanggal 28 Juni 2019 |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA JATISUKO

KETUA

SARNO

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 2 /DS-Jatisuko/Tahun 2019

Nomor : 2 /BPD -Jatisuko/Tahun 2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA JATISUKO

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2019-2025

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Juni Tahun Dua Ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUGENG RIYANTO : Kepala Desa Jatisuko dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatisuko selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SARNO : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Jatisuko dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jatisuko selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA**telah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2019-2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baikpenyesuaian dan perubahan RPJMDesa 2019-2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2019-2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Jatipuro untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA****(SUGENG RIYANTO)** | **PIHAK KEDUA****(SARNO)** |

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa 2019-2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di desa Jatisuko, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatisuko Tahun 2019-2025

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati RPJMDesa 2019-2025 dengan rincian sebagai berikut

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 2 | Tunjangan kades dan pardes |
| 3 | Tunjangan BPD |
| 4 | Operasional BPD |
| 5 | Biaya Operasional |
| 6 | ATK (Laptop, Komputer, Printer, DLL) |
| 7 | Perawatan Peralatan kantor |
| 8 | Internet, air, listrik |
| 9 | Jaminan kesehatan kades dan pardes |
| 10 | Jaminan ketenaga kerjaan |
| 11 | Jasa pengabdian |
| 12 | Bintek perangkat desa |
| 13 | Perawatan kendaraan dinas |
| 14 | Perawatan instalasi listrik |
| 15 | Perawatan jaringan internet |
| 16 | Rapat koordinasi |
| 17 | Perjalanan dinas |
| 18 | Peralatan dan perlengkapan kantor |
| 19 | Meja Kursi Kerja |
| 20 | Meja kursi rapat |
| 21 | Fiiling Cabinet |
| 22 | Perlengkapan rumah tangga kantor (alat dapur dan alat kebersihan) |
| 23 | Jasa kebersihan |
| 24 | Pemeliharaan ruangan kantor |
| 25 | Makan minum rapat |
| 26 | pelayanan administrasi umum dan kependudukan |
| 27 | penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil desa |
| 28 | pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa |
| 29 | Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan capil |
| 30 | pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif |
| 31 | pembentukan dan fasilitasi tim pendataan penduduk miskin |
| 32 | penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan APBDes |
| 33 | Penyelenggaraan musdes lainnya |
| 34 | penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/ RKPDes) |
| 35 | Penyusunan Dokumen Keuangan desa (APBDes, APBDes perubahan, LPJ,dll) |
| 36 | Pengelolaan administrasi/ inventarisasi/ penilaian aset desa |
| 37 | penyusunan kebijakan desa ( perdes, perkades selain perencanaan/ keuangan) |
| 38 | Penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa dan informasi kepada masyarakat |
| 39 | pengembangan sistem informasi desa |
| 40 | Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD |
| 41 | Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa |
| 42 | pengisian, penetapan, mutasi, pemberhentian perangkat desa |
| 43 | sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat desa |
| 44 | sertifikasi tanah kas desa |
| 45 | administrasi pertanahan |
| 46 | fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin |
| 47 | kegiatan penyuluhan pertanahan |
| 48 | Administrasi PBB |
| 49 | Penentuan/ penegasan batas/ patok tanah kas desa |
| 50 | penyusunan tata ruang desa dan peta desa |
| 51 | Pengadaan seragam PDU Kepala Desa |
| 52 | Pengadaan seragam PDH Kepala Desa dan Perangkat Desa |

b. Bidang Pembangunan

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** | **Karanganyar** |
| 1.1.1 | Drainase |
| 1.1.2 | Betonisasi RT 01, 02, 03 |
| 1.1.3 | Talud jalan Rt 01, 02, 03,  |
| 1.1.4 | Bermisasi |
| 1.1.5 | Gapura Dusun |
| 1.1.6 | Pos Kamling RT 002 |
| 1.1.7 | Pembangunan jalan usaha tani Timur Dusun (Jalan Sangen) |
| 1.1.8 | Talud jalan puter distrik |
| **1.2** | **Tegalkatak** |
| 1.2.1 | Drainase RT 04,05,06,07 |
| 1.2.2 | Betonisasi RT 04, 05, 06, 07 |
| 1.2.3 | Talud jalan Rt 04, 05, 06, dan jalan poros barat dan RT 07 |
| 1.2.4 | Perengkapan balai dusun |
| 1.2.5 | Gapura dusun |
| 1.1.6 | Jalan desa Jatisuko – Jatiwarno |
| 1.2.7 | Jalan usaha tani |
| **1.3** | **Garut** |
| 1.3.1 | Talud dam kali bankang |
| 1.3.2 | Talud jalan puter distrik |
| 1.3.3 | Talud depan rumah Bp. Sukiyo ±200 m |
| 1.3.4 | Talud jalan RT 09 perbatasan Jatiharjo |
| 1.3.5 | Makadam jalan perbatasan dengan Dusun Tegalkatak |
| 1.3.6 | Drainase depan rumah Bp.Miyanto ±100 m |
| 1.3.7 | Gapura masuk dusun |
| 1.3.8 | Pengadaan Gorong-gorong RT 09 |
| 1.3.9 | Drainase Jalan Puter Distrik Dusun Garut |
| 1.3.10 | Pelebaran Jalan tembus RT 09 |
| **1.4** | **Tengklik** |
| 1.4.1 | Talud Jalan Rt 11, 12, 13 |
| 1.4.2 | Rabat beton dan gorong-gorong Rt 13 |
| 1.4.3 | Drainase jalan |
| 1.4.4 | Talud irigasi selatan dusun |
| 1.4.5 | Makadam jalan Rt 11, 13 |
| 1.4.6 | Penerangan jalan |
| 1.4.7 | Betonisasi dan jembatan jalur pertanian Rt 11 |
| 1.4.8 | Makadam jalan Rt 14 |
| 1.4.9 | Balai RT 11 dan Rt 14 |
| 1.4.10 | Rabat beton dan jembatan jalur pertanian Rt 14 |
| 1.4.11 | Sensit jalan |
| **1.5** | **Rejosari** |
| 1.5.1 | Talud depan Pak Yoto dan Pak Man |
| 1.5.2 | Talud belakang Mintarto |
| 1.5.3 | Talud utara dusun |
| 1.5.4 | Talud jalaN Samping Pak Saridi |
| 1.5.5 | Jembatan barat rumah Bp Sisno / Talud |
| 1.5.6 | Sarana air bersih |
| **1.6** | **Gondopolo** |
| 1.6.1 | Gapura Dusun |
| 1.6.2 | Betonisasi 2 gang RT 17 dan 18 |
| 1.6.3 | Talud jalan makam sambat |
| 1.6.4 | Pos Kamling Rt 19 dan 20 |
| 1.6.5 | Betonisasi jalan + makadam RT 20 |
| 1.6.6 | Penerangan jalan  |
| 1.6.7 | Berem jalan Gondopolo Gandon |
| 1.6.8 | Pagar masjid dan Tempat wudhu |
| 1.6.9 | Balai RT 19 dan 20 |
| 1.6.10 | Betonisasi jalan perbatasan sambat |
| 1.6.11 | Berem jalan tengah dusun |
| 1.6.12 | Renovasi balai dusun |
| 1.6.13 | Talud jalan RT 19 dan 20 |
| 1.6.14 | Talud jalan RT 17 |
| **1.7** | **Pepe** |
| 1.7.1 | Gapura pembatas antar dusun |
| 1.7.2 | Drainase dan Talud Jalan Rt 21, 22, 23, 24 |
| 1.7.3 | Guling penahan erosi |
| 1.7.4 | Pengeboran sumber sipas RT 22 |
| 1.7.5 | Balai dusun Pepe |
| 1.7.6 | Pos kamling RT 22, 23, 24 |
| 1.7.7 | Talud saluran pertanian kali gentan |
| 1.7.8 | Wastafel setiap rumah 80 unit |
| 1.7.9 | Pengadaan kajang  |
| 1.7.10 | Neonisasi jalan dusun dan jalan makam |
| 1.7.11 | Rehab betonisasi RT 21, 22, 23, 24 |
| 1.7.12 | Berm Jalan DPU |
| 1.7.13 | Talud Jalan RT 22 panjang 100m |
| 1.7.14 | Talud Jalan RT 23 panjang 50 m |
| 1.7.15 | Betonisasi dan gorong-gorong RT 21 |
| 1.7.16 | Gapura batas RT 21, 22, 23, 24 |
| 1.7.17 | Jalan Usaha Tani |
| **1.8** | **Nanti** |
| 1.8.1 | Pembangunan jalan Dusun Nanti |
| 1.8.2 | Jalan gang di Rt 27/008 sepanjang 210 m  |
| 1.8.3 | Drainase RT 27 |
| 1.8.4 | Jalan gang di Rt 026/008 sepanjang 200 m (Jalan menuju lahan Pertanian) |
| 1.8.5 | Jalan gang di Rt 027/008 sepanjang 100 m (depan rumah Pak Gunadii) |
| 1.8.6 | Jalan gang di Rt 027/008 sepanjang 100 m (Depan rumah Bapak Paimin) |
| 1.8.7 | Lingkungan Sekolahan SDN 01  |
| 1.8.8 | Lapangan Desa Jatisuko |
| 1.8.9 | Jalan gang di Rt 025 dan 026/008 sepanjang 210 m  |
| 1.8.10 | Sungai di Dusun Nanti sepanjang 1000 m untuk mengaliri air rusak |
| 1.8.11 | Betonisasi dan talud jalan RT 025 |
| 1.8.12 | Talud jalan RT 27 |
| **1.9** | **Pendidikan** |
| 1.9.1 | Pembangunan gedung PAUD |
| 1.9.3 | Rehap pagar TK 01 |
| 1.9.4 | Gedung baru TK 02 |
| 1.9.5 | Rehap gedung TK 02 |
| 1.9.6 | Pembangunan pagar TK 02 |
| 1.9.7 | Pengadaan drum band TK 01 |
| 1.9.8 | Pengadaan meja kursi TK dan PAUD |
| 1.9.9 | Penambahan APE Luar TK 01 |
| 1.9.10 | Penambahan APE dalam dan Luar PAUD |
| 1.9.11 | Pengadaan rak APE dalam TK 01 |
| 1.9.12 | Pengadaan etalase PAUD |
| 1.9.13 | Pengadaan sound system TK dan PAUD |
| 1.9.14 | Pengadaan instalasi listrik |
| 1.9.15 | Penyuluhan keamanan masyarakat |
| 1.9.16 | Penyuluhan pemberdayaan masyarakat desa |
| 1.9.17 | Penyuluhan pernikahan dini |
| 1.9.18 | Penyuluhan keagamaan masyarakat desa |
| 1.9.19 | Honor guru TPA |
| **1.10** | **Kesehatan** |
| 1.10.1 | Rehap PKD |
| 1.10.2 | PMT posyandu dan Ibu hamil |
| 1.10.3 | Penyuluhan kesehatan (HIV, rokok, TBC) |
| 1.10.4 | Transport kader posyandu |
| 1.10.5 | KB-MKJP |
| 1.10.6 | Refresing kader |
| 1.10.7 | Operasional DS3 |
| 1.10.8 | Peralatan Posbindu |
| 1.10.9 | Peralatan Kelas ibu hamil |
| 1.10.10 | Penyuluhan stunting |
| 1.10.11 | PMT Pemulihan (Bumil KEK, Balita Gizi Buruk) |
| 1.10.12 | Pengadaan alat ukur stunting |
| 1.10.13 | Operasional Posbindu |
| **1.11** | **Desa** |
| 1.11.1 | Jalan Usaha Tani |
| 1.11.2 | Rehap Gedung Olahraga |
| 1.11.3 | Rehap Gedung Kantor |
| 1.11.4 | Rehap pagar kantor |
| 1.11.5 | Pembangunan saluran air jalan lokasi kantor |
| 1.11.6 | Pembangunan talud tanah kas Desa belakang SD 01 |
| 1.11.7 | Pembangunan taman kantor |
| 1.11.8 | Pemeliharaan gedung kantor |
| 1.11.9 | Halaman parkir |
| 1.11.10 | Wastafel kantor |
| 1.11.11 | Plafon teras kantor |
| 1.11.12 | Pengadaan wahana bermain anak |
| 1.11.13 | Rehap lapangan sepak bola |
| 1.11.14 | Pemeliharaan gedung olahraga |
| 1.11.15 | Pembangunan lapangan bola voli |
| 1.11.16 | Talud Belakang SDN 01 |
| 1.11.17 | Talud tanah Kas Desa |
| 1.11.18 | Pengadaan buku perpustakaan desa |

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Pembinaan Karang Taruna |
| 1.2 | Pembinaan kesehatan  |
| 1.3 | Pembinaan kelompok tani |
| 1.4 | Pembinaan RT RW |
| 1.5 | Pembinaan keamanan  |
| 1.6 | Tarling |
| 1.7 | Pengajian nurul qolbi |
| 1.8 | Kampung KB |
| 1.9 | Pembinaan KPMD |
| 1.10 | Pelatihan Linmas |
| 1.11 | Pembinaan dan pemberian bibit kelompok tani dan kelompok ternak |
| 1.12 | Pembinaan PKK |
| 1.13 | Operasional PKK |
| 1.14 | Pelatihan pertanian |
| 1.15 | Bintek perangkat Desa dan BPD |
| 1.16 | Peringatan Hari jadi Kabupaten Karanganyar |

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** | **Karanganyar** |
| 1.1.1 | Pelatihan remaja karang taruna |
| 1.1.2 | Pelatihan warga usia produktif |
| 1.1.3 | Fasilitasi keagamaan dan kesejahteraan guru TPA |
| 1.1.4 | Pelatihan kelompok tani |
| 1.1.5 | Pengadaan bibit padi |
| 1.1.6 | Pelatihan pengolahan (fermentasi) makanan ternak |
| 1.1.7 | Pelatihan pemanfaatan tanaman toga |
| 1.1.8 | Pengadaan almari karang taruna |
| 1.1.9 | Pengadaan sound system |
| **1.2** | **Tegalkatak** |
| 1.2.1 | Pelatihan dan permodalan remaja karang taruna dan lapangan bola voly |
| 1.2.2 | Pelatihan dan permodalan warga usia produktif |
| 1.2.3 | Fasilitasi keagamaan dan kesejahteraan guru TPA |
| 1.2.4 | Pelatihan dan permodalan kelompok tani |
| **1.3** | **Garut** |
| 1.3.1 | Pengadaan bibit cabe |
| 1.3.2 | Pengadaan bibit ternak |
| 1.3.3 | Pelatihan pertukangan |
| 1.3.4 | Honor guru TPA |
| 1.3.5 | Penambahan modal |
| 1.3.6 | Pengadaan bibit pisang buah |
| **1.4** | **Tengklik** |
| 1.4.1 | Honor guru TPA |
| 1.4.2 | Pengadaan bibit ternak |
| 1.4.3 | Pelatihan dan penambahan modal usaha budidaya jamur |
| 1.4.4 | Penambahan modal kelompok tani |
| 1.4.5 | Pipanisasi |
| 1.4.6 | Bantuan molen beton |
| **1.5** | **Rejosari** |
| 1.5.1 | Pembinaan kelompok ternak |
| 1.5.2 | Penyediaan obat-obat pertanian |
| 1.5.3 | Guru TPA |
| 1.5.4 | Penambahan modal usaha industri rumah tangga |
| **1.6** | **Gondopolo** |
| 1.6.1 | Pengadaan sarana pertanian dan bibit ternak |
| 1.6.2 | Pelatihan membuat kue |
| 1.6.3 | Pelatihan managemen dan pengolahan empon-empon |
| 1.6.4 | Pelatihan keterampilan kerja |
| 1.6.5 | Guru TPA |
| 1.6.6 | Pengajian rutin bapak-bapak |
| **1.7** | **Pepe** |
| 1.7.1 | Pengadaan bibit alpukat dan durian  |
| 1.7.2 | Pengadaan bibit ternak |
| 1.7.3 | Pengadaan erek |
| 1.7.4 | Pelatihan dan penambahan modal usaha budidaya jamur |
| 1.7.5 | Penambahan modal |
| **1.8** | **Nanti** |
| 1.8.1 | Budidaya Ikan air tawar / bioflog |
| 1.8.2 | Budidaya Jamur kurang Maksimal |
| 1.8.3 | Pelatihan pembuatan kue dan tenongan |
| 1.8.4 | Pelatihan budidaya ternak modern |
| 1.8.5 | Pelatihan pertanian modern |
| 1.8.6 | Pengadaan bibit pertanian |
| 1.8.7 | Penambahan modal kelompok tani |
| 1.8.8 | Pengadaan molen |
| 1.8.9 | Mesin perontok padi |
| 1.8.10 | Mesin perontok jagung |
| 1.8.11 | Tanaman Padi dan Polowijo hasil panen tidak maksimal  |
| 1.8.12 | Tanaman Sengon tidak bisa tumbuh dengan baik. |
| **1.9** | **Desa** |
| 1.9.1 | Pengadaan gamelan |
| 1.9.2 | Pembinaan keagamaan |
| 1.9.3 | Study banding ke PONPES |
| 1.9.4 | Pengadaan kegiatan Baca tulis Al Quran |
| 1.9.5 | Pengadaan buku keagamaan |
| 1.9.6 | Pengadaan seragam pengajian |
| 1.9.7 | Bantuan kelompok disabilitas |
| 1.9.8 | Pelatihan karawitan |
| 1.9.9 | Pelatihan dan peralatan jahit |
| 1.9.10 | Pembangunan RTLH |
| 1.9.11 | Pembangunan jambanisasi |
| 1.9.12 | Pengadaan kajang |
| 1.9.13 | Peringatan HUT RI |
| 1.9.14 | Pelatihan budidaya jamur |
| 1.9.15 | Pelatihan peningkatan hasil pertanian |
| 1.9.16 | Pelatihan pengurus BUMDES |
| 1.9.17 | Pelatihan budidaya ternak sapi |
| **1.10** | **PKK**  |
| 1.10.1 | Refresing Kader |
| 1.10.2 | Operasional PKK ditambah |
| 1.10.3 | Parenting |
| 1.10.4 | Pelatihan budidaya tanaman tabulapot |
| 1.10.5 | Pelatihan membuat kue |
| 1.10.6 | Penyuluhan perlindungan anak |

1. Bidang pembiayaan

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Penyertaan Modal BUMDES |

1. Bidang penanggulangan bencana, Darurat, Mendesak Desa

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Penanggulangan bencana alam |

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA JATISUKO**

1. Ketua / Anggota :SARNO (……………………)
2. Wakil Ketua/Anggota : SUWANDI (……………………)
3. Sekretaris / Anggota : YUDHA ADI PERDANA (……………………)
4. Kabid Pemerintahan : KASIH HARINI WIDIYASTUTI (……………………)

Dan Pembinaan Desa

1. Kabid Pembangunan : MARYATNO (……………………)

Dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

**DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDesa 2019-2025

DESA : JATISUKO

KECAMATAN : JATIPURO

TANGGAL : ……………………………………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | ………………………………. | Kepala Desa | …………………… |
|  | ………………………………. | Sekretaris Desa | …………………… |
|  | ………………………………. | Kaur Pemerintahan | …………………… |
|  | ………………………………. | Kaur Pembangunan | …………………… |
|  | ………………………………. | Kaur Umum | …………………… |
|  | ………………………………. | Ketua LPMD | …………………… |
|  | ………………………………. | Anggota LPMD | …………………… |
|  | ………………………………. | Ketua PKK. | …………………… |
|  | ………………………………. | Ketua Karang Taruna | …………………… |
|  | ………………………………. | Ketua dst | …………………… |
|  | ………………………………. | Ketua RW …. | …………………… |
|  | ………………………………. | Ketua RW …. | …………………… |
|  | ………………………………. | Ketua RT …. | …………………… |
|  | ………………………………. | Ketua RT …. | …………………… |
|  | ………………………………. | Ketua RT …. | …………………… |
|  | ………………………………. | Ketua RT …. | …………………… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | ………………………………. | Ketua RT …. | …………………… |
|  | Dst ……………….. | …………………………. …. | …………………… |

BPD Desa Jatisuko

Sekretaris,

(YUDHA ADI PERDANA)

### KEPALA DESA JATISUKO KECAMATAN JATIPURO

**KABUPATEN KARANGANYAR**

### PERATURAN DESA JATISUKO

**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)**

**TAHUN 2019-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JATISUKO,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  | : | * + - * 1. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
				2. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
				3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa;
13. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten 10 Nomor tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Bupati Karanganyar nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembanguan Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATISUKO**

**dan**

**KEPALA DESA JATISUKO**

**MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menetapkan** | **:** | **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2019-2025** |
|  |  |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Karanganyar
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

**BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2019-2025**

**Pasal 2**

1. Rencangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desapenyusunan RPJMDes untuk menbahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa

**BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA**

**Pasal 3**

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB IV**

**VISI DAN MISI**

##### Pasal 4

Visi : ***“ MENJADIKAN DESA JATISUKO YANG MAJU DAN BERMARTABAT ”***

##### Pasal 5

Misi :

|  |
| --- |
| 1. Meningkatkan peran dan kinerja lembaga dan

perangkatnya sesuai dengan tupoksinya  |
| 1. Meningkatkan pengelolaan aset desa untuk

peningkatan PAD |
| 1. Program swasembada air bersih
 |
| 1. Meningkatkan pengelolaan BUMDes untuk

kesejahteran masyarakat |
| 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 |
| 1. Membentuk dan mengelola badan ZIS (Zakat Infaq

dan Sodaqoh) untuk kesejahtaeraan masyarakat |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

**Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. .

**Pasal 10**

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di Jatisuko

Pada tanggal 28 Juni 2019

**KEPALA DESA JATISUKO**

 **SUGENG RIYANTO**

Diundangkan di Desa Jatisuko

Pada tanggal 28 Juni 2019

**Sekretaris Desa**

**FEBRIANA DWILESTARI**

Lembaran desa Jatisuko Tahun 2019 Nomor 2

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Jatisuko telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Jatisuko yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yand diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tengang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Jatisuko.

Jatisuko, 28 Juni 2019

Tim Penyusun

**DAFTAR ISI**

|  |
| --- |
| **COVER** **PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES**1. **BAB I : PENDAHULUAN**
	1. Latar Belakang
	2. Dasar Hukum
	3. Maksud Dan Tujuan
2. **BAB II : GAMBARAN UMUM DESA**
	1. **Legenda dan Sejarah Desa**
	2. **Kondisi Umum Desa**
		1. Sumber Daya Alam
		2. Sumber Daya Manusia
		3. Sumber Daya Pembangunan
		4. Sumber Daya Sosial Budaya

**2.3 SOTK Desa**1. **BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMDesa**
	1. Sosialisasi
	2. Musyawarah Dusun
	3. Musyawarah Desa
	4. Lokakarya Desa
	5. Musrenbangdesa RPJMDesa
2. **BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat1. **BAB V : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

**4.1. Visi Dan Misi**4.1.1. Visi Desa4.1.2. Misi Desa**4.2.Kebijakan Pembangunan**4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa4.2.2 Potensi Dan Masalah4.2.3 Program Pembangunan Desa4.2.4 Strategi Pencapaian**4.3. Kebijakan Keuangan Desa****4.4. Bidang dan kegiatan Indikatif**1. **BAB V : PENUTUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN:**1. Daftar Sumber Daya Manusia
2. Daftar Sumber Daya Pembangunan
3. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa
5. Daftar gagasan Dusun/ kelompok
6. Daftar Masalah Dari kelender Musim
7. Daftar masalah dari kelembagaan desa
8. Tabel data Skala Prioritas Perdusun
9. Tabel alternatif tindakan pemecahan masalah
10. Tabel RPJMDesa
11. Berita acara pelaksanaan PKD
12. Berita acara Musdus, Musdes, Musrenbangdesa
13. Berita acara Musdes penyusunan rancanagan RPJMDesa
14. Peta Sosial Desa
15. Foto kegiatan (soialisasi, PKD, Musdus, Musdes, Lokakarya Desa,

 Musrenbangdesa, dll) |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuat desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Jatisuko ini merupakan rencana strategis Desa Jatisuko untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingka Kabupaten. Spirit ini apabila dapagt dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Goverment*) seperti patisipasif, transparan dan akuntabilitas.

* 1. **DASAR HUKUM**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16Tahun 2018tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
	1. **MAKSUD DAN TUJUAN**
	2. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannyaUndang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.
	1. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM DESA**

**2.1 Legenda dan Sejarah Desa**

Desa Jatisuko adalah salah satu Desa di Kecamatan Jatipuro yang terletak di paling utara dari Kecamatan Jatipuro dan berbatasan dengan Kecamatan Jumapolo, nama ini terjadi pada tahun 1933, jika dilihat dari kejadian ini tidak akan nyata lagi sebb sebelumnya wilayah Jatipuro yang dahulu panewon itu terdapat 29 Desa. Pemerintahan saat ini adalah pemerintahan Kolonial Belanda yang juga dibawah kekuasaan Mangkunegaran. Para panggowo yang sekarang disebut Perangkat Desa juga sabagai abdi dalem Mangkunegaran.

Sebelum bernama Jatisuko. Desa ini terdiri dari 2 Kelurahan yaitu :

Kelurahan Gondopolo yang terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Gondopolo, Dusun Pepe, Dusun Rejosari, Dusun Tengklik dan Dusun Nanti.

Kelurahan Garut yang terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Garut, Dusun Tegalkatak, dan Dusun Karanganyar.

Kemudian Desa Jatisuko terus berkembang dengan 5 kali pergantian Kepala Desa :

1. Bapak Podo Ikromo
2. Bapak Harjono
3. Bapak Saiman
4. Pj. Bapak Mukiman
5. Bapak Suyato
6. Pj. Bapak Rahmanto
7. Bapak Siran
8. Pj. Ibu Sri ningsih S.Sos, MM
9. Bapak Sugeng Riyanto

**2.1 Sumber Daya Alam**

1. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Jatisuko , terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Ploso

Sebelah selatan : Desa Jatiwarno dan Desa Jatiharjo

Sebelah Barat : Desa Karangbangun dan Desa Jatimulyo

Sebelah Timur : Desa Jatikuwung

1. Luas Wilayah Desa
2. Sawah : 152,0 ha
3. Bukan sawah
	* + - Pekarangan : 28,0 ha
			- Tegal : 23,0 ha
			- Lainnya : 7,3245 ha
4. Orbitasi
5. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 5 KM
6. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 Menit
7. Jarak ke ibu kota kabupetan : 40 KM
8. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 30 Menit
9. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
10. Kepala Keluarga : 991 KK
11. Laki-laki : 1516 Orang
12. Perempuan : 1434 Orang

**2.2 Sumber Daya Manusia**

* + - * 1. Pendidikan
1. SD/ MI : 1454 Orang
2. SLTP/ MTs : 615 Orang
3. SLTA/ MA : 491 Orang
4. S1/ Diploma : 84 Orang
5. Putus Sekolah : - Orang
6. Buta Huruf : .... Orang
	* + - 1. Lembaga Pendidikan
7. Gedung TK/PAUD : 2 buah/ Lokasi di Dusun Nanti, dan Dusun Tegalkatak
8. SD/MI : 3 buah/ Lokasi di Dusun Nanti, Dusu

 Tegalkatak dan Dusun Gondopolo

1. SLTP/MTs : 1 buah/ Lokasi di Dusun Tengklik
2. SLTA/MA : - buah
3. Lain-lain : - buah
	* + - 1. Kesehatan
4. Kematian Bayi
5. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 20 orang
6. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : - orang
7. Kematian Ibu Melahirkan
8. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 20 orang
9. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini: - orang
10. Cakupan Imunisasi
11. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 20 orang
12. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 21 orang
13. Cakupan Imunisasi Cacar : 16 orang
14. Gizi Balita
15. Jumlah Balita : 174 orang
16. Balita gizi buruk : - orang
17. Balita gizi baik : 163 orang
18. Balita gizi kurang : 11 orang
19. Pemenuhan air bersih
20. Pengguna sumur galian : ........KK
21. Pengguna air PAH : ...........KK
22. Pengguna sumur pompa : - KK
23. Pengguna sumur hidran umum : - KK
24. Pengguna air sungai : - KK
	* + - 1. Keagamaan.

# Data Keagamaan Desa Jatisuko

Jumlah Pemeluk :

* + - Islam : 2953 orang
		- Katolik : 5 orang
		- Kristen : 5 orang
		- Hindu : - orang
		- Budha : - orang

# Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

* + - Masjid/ Musholla : 11 buah
		- Gereja : - buah
		- Pura : - buah
		- Vihara : - buah

**2.3 Sumber Daya Ekonomi, Sosial dan Budaya**

* + - 1. Pertanian

Jenis Tanaman :

* 1. Padi sawah : ........ .ha
	2. Padi Ladang : .............ha
	3. Jagung : ........ .ha
	4. Palawija : .............ha
	5. Tembakau : - ha
	6. Tebu : .............ha
	7. Kakao/ Coklat : - ha
	8. Sawit : - ha
	9. Karet : - ha
	10. Kelapa : - ha
	11. Kopi : - ha
	12. Singkong : ........... ha
	13. Lain-lain : .............ha
		+ 1. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani : 643 orang
2. Pedagang : 524 orang
3. PNS : 27 orang
4. Guru : 11 orang
5. Bidan/ Perawat : 5 orang
6. TNI/ Polri : 1 orang
7. Pesiunan : 4 orang
8. Sopir/ Angkutan : 9 orang
9. Buruh : 10 orang
10. Jasa persewaan : 2 orang
11. Swasta : 607 orang

**2.2. SOTK DESA**

1. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 14 orang
4. BPD : 5 orang
5. Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM : 4 Kelompok
2. PKK : 9 Kelompok
3. Posyandu : 10 Kelompok
4. Pengajian : 1 Kelompok
5. Arisan : 3 Kelompok
6. Simpan Pinjam : 1 Kelompok
7. Kelompok Tani : 12 Kelompok
8. Gapoktan : 1 Kelompok
9. Karang Taruna : 9 Kelompok
10. Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1. Dusun Karanganyar : Jumlah 3 RT
2. Dusun Tegalkatak : Jumlah 4 RT
3. Dusun Garut : Jumlah 3 RT
4. Dusun Tengklik : Jumlah 4 RT
5. Dusun Rejosari : Jumlah 2 RT
6. Dusun Gondopolo : Jumlah 4 RT
7. Dusun Pepe : Jumlah 4 RT
8. Dusun Nanti : Jumlah 3 RT
9. Struktur Organisasi Desa

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN**

**DESA JATISUKO**

**KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR**

**NAMA-NAMA APARAT DESA :**

Kepala desa : SUGENG RIYANTO

Sekretaris Desa : FEBRIANA DWILESTARI

Kepala Seksi Pemerintahan : SIGID WAHYUDI

Kepala Seksi Kesejahteraan : TRI HARSONO

Kepala Seksi Pelayanan : SUNARKO

Kepala Urusan TU dan Umum : SUNARJO

Kepala Urusan Perencanaan : WARNO

Kepala Ururan Keuangan : ARIS SUWARNO

Kepala Dusun

1. Dusun Karanganyar : TRININGSIH

2. Dusun Tegalkatak : YOGI SYAHLAM MAULANA

3. Pj Dusun Garut : MARYADI

4. Dusun Tengklik : MARYADI

5. Dusun Rejosari : DIYONO

6. Dusun Gondopolo : SUKARNO

7. Dusun Pepe : WALUYO

8. Dusun Nanti : SUNARMI

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DESA JATISUKO**

**KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR**

**NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

1. Ketua / Anggota : SARNO
2. Wakil Ketua/Anggota : SUWANDI
3. Sekretaris / Anggota : YUDHA ADI PERDANA
4. Kabid Pemerintahan : KASIH HARINI WIDIYASTUTI

Dan Pembinaan Desa

1. Kabid Pembangunan : MARYATNO

Dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

**BAB III**

**MASALAH DAN POTENSI**

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

1. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

1. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

**BAB IV**

**RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

**4.1 BIDANG PEMERINTAHAN**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 2 | Tunjangan kades dan pardes |
| 3 | Tunjangan BPD |
| 4 | Operasional BPD |
| 5 | Biaya Operasional |
| 6 | ATK (Laptop, Komputer, Printer, DLL) |
| 7 | Perawatan Peralatan kantor |
| 8 | Internet, air, listrik |
| 9 | Jaminan kesehatan kades dan pardes |
| 10 | Jaminan ketenaga kerjaan |
| 11 | Jasa pengabdian |
| 12 | Bintek perangkat desa |
| 13 | Perawatan kendaraan dinas |
| 14 | Perawatan instalasi listrik |
| 15 | Perawatan jaringan internet |
| 16 | Rapat koordinasi |
| 17 | Perjalanan dinas |
| 18 | Peralatan dan perlengkapan kantor |
| 19 | Meja Kursi Kerja |
| 20 | Meja kursi rapat |
| 21 | Fiiling Cabinet |
| 22 | Perlengkapan rumah tangga kantor (alat dapur dan alat kebersihan) |
| 23 | Jasa kebersihan |
| 24 | Pemeliharaan ruangan kantor |
| 25 | Makan minum rapat |
| 26 | pelayanan administrasi umum dan kependudukan |
| 27 | penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil desa |
| 28 | pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa |
| 29 | Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan capil |
| 30 | pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif |
| 31 | pembentukan dan fasilitasi tim pendataan penduduk miskin |
| 32 | penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan APBDes |
| 33 | Penyelenggaraan musdes lainnya |
| 34 | penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/ RKPDes) |
| 35 | Penyusunan Dokumen Keuangan desa (APBDes, APBDes perubahan, LPJ,dll) |
| 36 | Pengelolaan administrasi/ inventarisasi/ penilaian aset desa |
| 37 | penyusunan kebijakan desa ( perdes, perkades selain perencanaan/ keuangan) |
| 38 | Penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa dan informasi kepada masyarakat |
| 39 | pengembangan sistem informasi desa |
| 40 | Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD |
| 41 | Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa |
| 42 | pengisian, penetapan, mutasi, pemberhentian perangkat desa |
| 43 | sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat desa |
| 44 | sertifikasi tanah kas desa |
| 45 | administrasi pertanahan |
| 46 | fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin |
| 47 | kegiatan penyuluhan pertanahan |
| 48 | Administrasi PBB |
| 49 | Penentuan/ penegasan batas/ patok tanah kas desa |
| 50 | penyusunan tata ruang desa dan peta desa |
| 51 | Pengadaan seragam PDU Kepala Desa |
| 52 | Pengadaan seragam PDH Kepala Desa dan Perangkat Desa |

**4.2 BIDANG PEMBANGUNAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **MASALAH** | **PENYEBAB MASALAH** | **POTENSI** |
| **1.** | **BIDANG PEMBANGUNAN** |  |  |
| **1.1** | **Karanganyar** |  |  |
| 1. | Talud jalan Rt 01, 02, 03  | Rawan longsor | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 2 | Betonisasi RT 01, 02, 03 | Jalan rusak | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 3 | Drainase | Saat musim hujan air masuk jalan | 1. Swadaya tenaga
2. lahan
 |
| 4 | Gapura Dusun | Belum ada pembatas wilayah | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
3. pemdes
 |
| 5 | Bermisasi | Jalan masih sempit | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 7 | Pos Kamling RT 002 | Belum ada Pos Rondanya | 1. lahan
2. swadaya tenaga
3. pemdes
 |
| 8 | Pembangunan jalan usaha tani Timur Dusun (Jalan Sangen) | Jika musim penghujan sangat becek dan lisin | 1. lahan
2. swadaya tenaga
3. pemkab
4. pemdes
 |
| **1.2** | **Tegalkatak** |  |  |
| 1 | Talud jalan Rt 04, 05, 06, dan jalan poros barat dan RT 07 | Rawan longsor | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 2 | Drainase RT 04,05,06,07 | Saat musim hujan air masuk jalan | 1. Swadaya tenaga
2. lahan
 |
| 3 | Betonisasi RT 04, 05, 06, 07 | Jalan rusak | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 4 | Gapura dusun | Belum ada tanda batas Dusun | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 5 | Jalan usaha tani | Rusak | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 6 | Perengkapan balai dusun | Kurangnya perlengkapan dan sarpras di balai dusun | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 7 | Jalan desa Jatisuko - Jatiwarno | Jalan muli rusak | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| **1.3** | **Garut** |  |  |
| 1 | Berm dan drainase jalan puter distrik | Air meluap ke teras rumah | 1. Swadaya tenaga
2. Lahan
 |
| 2 | Talud jalan puter distrik | ErosiAir masuk jalan | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 3 | Talud jalan RT 09 perbatasan Jatiharjo | Rawan Longsor | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 4 | Makadam jalan perbatasan dengan Dusun Tegalkatak | Jalan becek saat musim penghujan | 1. Swadaya tenaga
2. Lahan
 |
| 5 | Gapura masuk dusun | Gapura lama sempit | 1. Swadaya tenaga
2. Lahan
 |
| 6 | Drainase depan rumah Bp.Miyanto ±100 m | Air meluap | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 7 | Pengadaan Gorong-gorong RT 09 | Air meluap | 1. Swadaya tenaga
2. lahan
 |
| 8 | Pelebaran Jalan tembus RT 09 | Jalan sempit | 1. Swadaya tenaga
2. Lahan
 |
| 9 | Talud dam kali bankang | Bocor | 1. Swadaya tenaga
2. lahan
 |
| 10 | Talud jalan depan rumah Bp. Sukiyo  | Rawan longsor | 1. Swadaya tenaga
2. lahan
 |
| **1.4** | **Tengklik** |  |  |
| 1 | Talud Jalan Rt 11, 12, 13 | Rawan longsor | 1. lahan
2. pemdes
3. swadaya tenaga
4. pemkab
 |
| 2 | Rabat beton dan gorong-gorong Rt 13 | Jalan rusak dan aliran air kurang tertata rapi | 1. lahan
2. swadaya tenaga
3. pemdes
 |
| 3 | Drainase jalan | Lingkungan yang kurang rapi dan aliran air tidak terarah | 1. lahan
2. swadaya tenaga
3. pemdes
4. pemkab
 |
| 4 | Talud irigasi selatan dusun | Rawan longsor | 1. lahan
2. swadaya tenaga
3. pemdes
 |
| 5 | Makadam jalan Rt 11, 13 | Jalan masih tanah | 1. lahan
2. swadaya tenaga
3. pemdes
 |
| 6 | Bantuan molen beton | Jika ada kegiatan msih menyewa | 1. swadaya tenaga
2. pemkab
3. pemdes
 |
| 7 | Penerangan jalan | Jika malam hari masih terlalu gelap dan keamanan masih rawan | 1. swadaya tenaga
2. pemdes
3. pemkab
 |
| 8 | Betonisasi dan jembatan jalur pertanian Rt 11 | Jalan dan jembatan rusak | 1. swadaya tenaga
2. lahan
 |
| 9 | Makadam jalan Rt 14 | Jalan masih tanah | 1. lahan
2. swadaya tenaga
 |
| 10 | Balai RT 11 | Belum ada balai pertemuan RT | 1. lahan
2. swadaya tenaga
 |
| 11 | Rabat beton dan jembatan jalur pertanian Rt 14 | Jalan dan jembatan rusak | 1. swadaya tenaga
2. lahan
 |
| 12 | Sensit jalan | Jalan rusak | 1. swadaya tenaga
2. lahan
 |
| **1.5** | **Rejosari** |  |  |
| 1 | Talud belakang Mintarto | 1. Rawan longsor
 | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 2 | Talud utara dusun | 1. Rawan longsor
 | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 3 | Talud jalaN Samping Pak Saridi | 1. Rawan longsor
 | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 4 | Jembatan barat rumah Bp Sisno / Talud | 1. Sudah rusak
 | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 5 | Talud depan Pak Yoto dan Pak Man | 1. Rawan longsor
 | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 6 | Sarana air bersih | 1. Sarana air bersih kurang
 | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| **1.6** | **Gondopolo** |  |  |
| 1 | Berem jalan Gondopolo Gandon | Jalan masih sempit | 1. Swadaya tenaga
2. lahan
 |
| 2 | Talud jalan makam sambat | Rawan longsor | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 3 | Betonisasi jalan perbatasan sambat | Jalan rusak | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 4 | Neonisasi | Penerangan jalan kurang | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 5 | Pagar masjid dan Tempat wudhu | Pagar dan tempat wudhu sudah tidak layak | 1. Swadaya tenaga
2. Lahan
 |
| 6 | Berem jalan tengah dusun | Pinggiran jalan tidak rapi | 1. Swadaya tenaga
2. Lahan
 |
| 7 | Betonisasi 2 gang Rt 17 dan 18 | Jalan rusak | 1. Swadaya tenaga
2. lahan
 |
| 8 | Talud jalan Rt 17 | Rawan longsor | 1. Swadaya tenaga
2. lahan
 |
| **1.7** | **Gandon** |  |  |
| 1 | Betonisasi jalan + makadam RT 20 | Jalan rusak | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 2 | Balai RT 19 dan 20 | Belum ada balai pertemuan RT | 1. Swadaya tenaga
2. Lahan
 |
| 3 | Renovasi balai dusun | Balai dusun mulai rusak | 1. Swadaya tenaga
2. Lahan
 |
| 4 | Talud jalan RT 19 dan 20 | Rawan longsor | 1. Swadaya tenaga
2. Lahan
 |
| 5 | Gapura Dusun | Belum ada tanda batas dusun | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 6 | Penerangan jalan  | Jalan desa masih kurang penerangan | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| **1.8** | **Pepe** |  |  |
| 1 | Drainase dan Talud Jalan Rt 21, 22, 23, 24 | Lingkungan yang kurang rapi dan aliran air tidak terarah | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 2 | Guling penahan erosi | Kondisi sekitar jembatan rawan | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 3 | Balai dusun Pepe | Belum ada tempat pertemuan wargaTempat peralatan dusun belum ada | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 4 | Rehab betonisasi RT 21, 22, 23, 24 | Jalan mulai rusak | 1. Swadaya tenaga
2. Lahan
 |
| 5 | Talud saluran pertanian kali gentan | Lahan sekitar rawan | 1. Swadaya tenaga
 |
| 6 | Betonisasi dan gorong-gorong RT 21 |  | * 1. Lahan
	2. Swadaya tenaga
 |
| 7 | Neonisasi jalan dusun dan jalan makam | Kurangnya penerangan jalan | 1. Swadaya tenaga
 |
| 8 | Wastafel setiap rumah 80 unit | Kurangnya kesadaran warga untuk cuci tangan | 1. Swadaya tenaga
 |
| 9 | Talud Jalan RT 22 panjang 100m dan RT 23 50m | Rawan longsor | * 1. Swadaya tenaga
	2. Lahan
 |
| 10 | Gapura pembatas antar dusun | Belum adanya tanda batas antar dusun | 1. Swadaya tenaga
2. lahan
 |
| 11 | Gapura batas RT 21, 22, 23, 24 |  |  |
| 12 | Pengadaan kajang  | Kurangnya peralatan hajatan warga | 1. Swadaya tenaga
 |
| 13 | Pos kamling RT 22, 23, 24 | Pos keamanan yang kurang layak | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 14 | Pengeboran sumber sipas RT 22 | Kondisi air minum kurang layak | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 15 | Berm Jalan DPU | Pinggiran jalan kurang rapi | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| 16 | Jalan usaha tani | Jalan rusak | 1. Lahan
2. Swadaya tenaga
 |
| **1.8** | **Nanti** |  |  |
| 1 | Pembangunan jalan Dusun Nanti | 1. Belum ada drainase
2. Jalan sebagian aspal telah rusak
3. Perlu penguatan talud jalan
 | 1. Lahan
2. Tenaga
3. Swadaya
4. Pemdes
 |
| 2 | Betonisasi dan talud jalan RT 025 | 1. Rawan longsor
 |  |
| 3 | Drainase RT 27 | 1. Air meluap
 | 1. Lahan
2. Tenaga
3. LKD
 |
| 4 | Jalan gang di Rt 27/008 sepanjang 210 m  | 1. Jalan sempit
2. Tidak ada drainase
 | 1. Lahan
2. Tenaga
3. LKD
 |
| 5 | Jalan gang di Rt 027/008 sepanjang 100 m (depan rumah Pak Gunadii) | 1. Jalan sempit
2. Tidak ada drainase
 | 1. Lahan
2. Tenaga
3. Swadaya
 |
| 6 | Jalan gang di Rt 026/008 sepanjang 200 m (Jalan menuju lahan Pertanian) | 1. Jalan sempit
2. Betonisasi tapak roda
3. Tidak ada drainase
4. Tidak ada talut
 | 1. Lahan
2. Tenaga
3. LKD
4. Swadaya
 |
| 7 | Jalan gang di Rt 027/008 sepanjang 100 m (Depan rumah Bapak Paimin) | 1. Betonisasi saat turun hujan licin
2. Tidak ada Drainase
 | 1. Lahan
2. Tenaga
3. Swadaya
 |
| 8 | Jalan gang di Rt 025 dan 026/008 sepanjang 210 m  | 1. Jalan sempit
2. Tidak ada drainase
 | 1. Lahan
2. Tenaga
3. LKD
 |
| 9 | Sungai di Dusun Nanti sepanjang 1000 m untuk mengaliri air rusak | 1. Tidak adanya Tulud Air
2. Kurangnya Gotong Royong dari Pengguna Air untuk melancarkan air di musim penghujan
 | 1. Lahan
2. Masyarakat
3. Pemdes
4. Tomas
5. POKTAN
6. Gapoktan
 |
| 10 | Lapangan Desa Jatisuko | 1. Kurang representatif.
2. Hujan sangat becek.
3. Ada saluran sungai yang kurang memadai
4. Tidak adanya draninase lapangan
 | 1. Tenaga
2. Karang Taruna
3. Pemdes
4. Swadaya
 |
| 11 | Lingkungan Sekolahan SDN 01  | 1. Tanah labil
2. Belum ada talud
3. Tempat cuci tangan murid
 | 1. Tenaga
2. LKD
3. Pemdes
4. Swadaya
 |
| 12 | Talud jalan Rt 27 | Rawan longsor | 1. Swadaya tenaga
2. lahan
 |

**4.3 BIDANG PEMBINAAN**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Pembinaan Karang Taruna |
| 1.2 | Pembinaan kesehatan  |
| 1.3 | Pembinaan kelompok tani |
| 1.4 | Pembinaan RT RW |
| 1.5 | Pembinaan keamanan  |
| 1.6 | Tarling |
| 1.7 | Pengajian nurul qolbi |
| 1.8 | Honor guru TPA |
| 1.9 | Kampung KB |
| 1.10 | Pembinaan KPMD |
| 1.11 | Pelatihan Linmas |
| 1.12 | Pembinaan dan pemberian bibit kelompok tani dan kelompok ternak |
| 1.13 | Pembinaan PKK |
| 1.14 | Operasional PKK |
| 1.15 | Pelatihan pertanian |
| 1.16 | Bintek perangkat Desa dan BPD |

**4.4 BIDANG PEMBERDAYAAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **MASALAH** | **PENYEBAB MASALAH** | **POTENSI** |
| **2.** | **BIDANG PEMBERDAYAAN**  |  |  |
| **2.1** | **Karanganyar** |  |  |
| 1 | Pengadaan bibit padi | Jika musim tanam masyarakat masih mencar bibit di toko yang harganya mahal | 1. Poktan
2. Pemdes
3. Pemkab
 |
| 2 | Pelatihan pengolahan (fermentasi) makanan ternak |  |  |
| 3 | Pengadaan Sound System | Belum ada peralatan sound system | 1. Karang Taruna
 |
| 4 | Pelatihan kelompok tani | Masih banyk petani yang menggunakan pupuk kimia saat masa tanam | 1. Lahan
2. Gapoktan
 |
| 5 | Almari Inventaris Karang Taruna | Buku-buku belum tertata dengan rapi | 1. Karang taruna
 |
| 6 | Fasilitasi keagamaan dan kesejahteraan guru TPA | 1. masih minim
 | 1. warga
 |
| 7 | Pelatihan remaja karang taruna | 1. Masih banyak remaja yang buruh kasar
 | 1. SDM
2. Karang taruna
 |
| 8 | Pelatihan warga usia produktif | 1. Masih banyak usia produktif yang merantau
 | 1. warga

  |
| 9 | Pelatihan pemanfaatan tanaman toga |  |  |
| **2.2** | **Tegalkatak** |  |  |
| 1 | Fasilitasi keagamaan dan kesejahteraan guru TPA | masih minim | 1. warga
 |
| 2 | Pelatihan dan permodalan remaja karang taruna dan lapangan bola voly | Masih banyak remaja yang buruh kasar | 1. SDM
2. Karang taruna
 |
| 3 | Pelatihan dan permodalan kelompok tani | Masih banyk petani yang menggunakan pupuk kimia saat masa tanam | 1. Lahan
2. Gapoktan
 |
| 4 | Pelatihan dan permodalan warga usia produktif | Masih banyak usia produktif yang merantau | 1. warga

  |
| **2.3** | **Garut** |  |  |
| 1 | Pengadaan bibit cabe | Kurangnya pemanfaatan lahan warga | 1. SDM
2. Gapoktan
3. Pemdes
4. Lahan
 |
| 2 | Pengadaan bibit pisang buah |  | 1. Gapoktan
 |
| 3 | Pengadaan bibit ternak | Kurangnya penguatan ekonomi warga | 1. Lahan

  |
| 4 | Penambahan modal kelompok tani | Kurangnya permodalan pengadaan pupuk dan obat-obatan pertanian | 1. Gapoktan
2. Swadaya tenaga
 |
| 5 | Honor guru TPA | Belum ada operasional guru TPA | 1. SDM
 |
| 6 | Pelatihan pertukangan | Masih minimnya pengetahuan di bidang pertukangan | 1. Kelompok pertukangan
 |
| **2.4** | **Tengklik** |  |  |
| 1 | Honor guru TPA | Belum ada operasional guru TPA | 1. SDM
 |
| 2 | Penambahan modal kelompok tani | Kurangnya permodalan pengadaan pupuk dan obat-obatan pertanian | 1. Gapoktan
2. Swadaya tenaga
 |
| 3 | Pengadaan bibit ternak | Kurangnya penguatan ekonomi warga | 1. Lahan

  |
| 4 | Pipanisasi | Pipa lama mulai aus | 1. Swadaya tenaga
 |
| 5 | Pelatihan dan penambahan modal usaha budidaya jamur | 1.Kurang mengetahui cara pemeliharaan.2. Kurangnya modal  | 1. Lahan
2. Gapoktan
3. Pemdes
 |
| 6 | Bantuan molen beton | Jika ada kegiatan masih menyewa | 1. Warga
2. Pemdes
 |
| **2.5** | **Rejosari** |  |  |
| 1 | Penambahan modal usaha industri rumah tangga | Kekurangan modal | 1. Ibu-ibu pkk dusun
 |
| 2 | Pelatihan kelompok ternak | 1. Kurangnya pengetahuan tentang ternak
 | 1. SDM
2. Gapoktan
 |
| 3 | Guru TPA | 1. TPA kurang berjalan
 | 1. Anak
2. Pemdes
3. Orang tua
 |
| 4 | Penyediaan obat-obat pertanian | 1. Kekurangan modal
 | 1. SDM
2. Gapoktan
3. Kel. tani
 |
| **2.6** | **Gondopolo** |  |  |
| 1 | Pengadaan sarana pertanian dan bibit ternak | 1. Kurangnya pemanfaatan lahan warga
 | 1. SDM
2. Gapoktan
3. Pemdes
4. Lahan
 |
| 2 | Pelatihan keterampilan kerja | * 1. kurangnya keterampilan kerja remaja
 | 1. karang taruna  |
| 3 | Pelatihan membuat kue | 1. Ibu-ibu kurang produktif
 | 1. warga

  |
| 4 | Guru TPA | 1. guru satifa
 | 1. Anak
2. Pemdes
3. Orang tua
 |
| 5 | Pelatihan managemen dan pengolahan empon-empon | 1. ibu-ibu kurang produktif
 | 1. warga
 |
| 6 | Pengajian rutin bapak-bapak | 1. Kurangnya pengalaman agama
 | 1. warga
 |
| **2.7** | **Pepe** |  |  |
| 1 | Pengadaan bibit alpukat dan durian  | 1. Kurangnya pemanfaatan lahan warga
 | 1. SDM
2. Gapoktan
3. Pemdes
4. Lahan
 |
| 2 | Pengadaan bibit ternak | 1. Kurangnya penguatan ekonomi warga
 | 1. Lahan

  |
| 3 | Pengadaan erek | 1. Kurangnya peralatan pertanian warga
 | 1. Gapoktan
 |
| 4 | Pelatihan dan penambahan modal usaha budidaya jamur | 1.Kurang mengetahui cara pemeliharaan.2. Kurangnya modal  | 1. Lahan
2. Gapoktan
3. Pemdes
 |
| 5 | Penambahan modal | Kurangnya permodalan pengadaan pupuk dan obat-obatan pertanian | 1. Gapoktan III dan IV
2. Swadaya tenaga
 |
| **2.8** | **Nanti** |  |  |
| 1 | Budidaya Ikan air tawar / bioflog | 1. Kurang maksimal
2. Belum adanya kelompok Mina
 | 1. Lahan
2. Sumber air
3. Pemdes
 |
| 2 | Budidaya Jamur kurang Maksimal | 1.Kurang mengetahui cara pemeliharaan.2. Kurangnya modal  | 1. Lahan
2. Gapoktan
3. Pemdes
 |
| 3 | Pelatihan pembuatan kue dan tenongan | 1. Kurangnya pengetahuan tentang cara membuat kue
 | * 1. Ibu-ibu PKK dusun
 |
| 4 | Pelatihan budidaya ternak modern | 1. Kurangnya pengetahuan tentang budidaya ternak modern
 | * 1. warga
 |
| 5 | Pelatihan pertanian modern | 1. Kurangnya pengetahuan tentang pertanian modern
 | 1. Kelompok tani
 |
| 6 | Pengadaan bibit pertanian | 1. Jika musim tanam masih mengandalkan pembelian di toko pertanian yang harganya sangat mahal
 | 1. Lahan
2. Pemdes
3. Dispertan
 |
| 7 | Penambahan modal kelompok tani | 1. Sementara hanya mengandalkan iuran dari anggota kelompok
 | 1. Kelompok tani
2. BUMDes
3. Pemdes
 |
| 8 | Pengadaan molen | 1. Saat kegiatan pembangunan masih menyewa
 | 1. warga
 |
| 9 | Mesin perontok padi | 1. Kuranganya mesin perontok padi
 | 1. Lahan
2. Gapoktan
3. Pemdes
 |
| 10 | Mesin perontok jagung | 1. Membutuhkan waktu yang lama jika merontokkan jagung secara manual
 |  |
| 11 | Tanaman Padi dan Polowijo hasil panen tidak maksimal  | 1. Kekurangan pupuk
2. Harga pupuk mahal
3. Kurang perawatan
 | 1. SDM
2. Gapoktan
3. Pemdes
4. Lahan
 |
| 12 | Tanaman Sengon tidak bisa tumbuh dengan baik. | 1. Hama ulat kantong
2. Kurang mengetahui cara perawatan dan pemeliharaan
3. Kurang pupuk
4. Belum ada penyemprotan
 | 1. SDM
2. Gapoktan
3. Kel. tani
4. Pemdes
5. Lahan
 |
| **2.9** | **PKK** |  |  |
| 1 | Operasional PKK ditambah | Operasional sebelumnya belum mencukupi |  |
| 2 | Etalase dan meja kursi PKK | Kekurangan meja kursi rapat | 1. Kader PKK
 |
| 3 | Pelatihan dan peralatan membuat kue | Kurangnya pengetahuan tentang cara membuat kue | 1. warga
 |
| 4 | Parenting | Peningkatan pengetahuan kader tentang parenting | 1. Kader PKK
 |
| 5 | Pelatihan budidaya tanaman tabulapot | Kurangnya pengetahuan tentang tabulapot | 1. Kader PKK
 |
| 6 | Refresing Kader | Peningkatan pengetahuan kader | 1. SDM
2. Pemdes
 |
| **2.10** | **KESEHATAN** |  |  |
| 1 | Peralatan kelas ibu hamil | Belum ada peralatan kelas ibu hamil | * 1. Ibu hamil
	2. Bidan desa
 |
| 2 | APE Posyandu dan peralatan posyandu |  | 1. Kader posyandu
2. balita
 |
| 3 | Peralatan posbindu | Belum ada peralatan posbindu |  |
| **2.11** | **DESA** |  |  |
| 1 | Pengadaan gamelan | kurangnya sarana dan prasarana kesenian | 1. Masyarakat
2. Pemdes
 |
| 2 | Pembinaan keagamaan | Kurangya kesadaran di bidang keagamaan | 1. Masyarakat
 |
| 3 | Pembinaan pengajian nurul Qolbi | Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pengajian | 1. Masyarakat
 |
| 4 | Study banding ke PONPES | Kurangnya pengetahuan di bidang agama | 1. Masyarakat
2. Tokoh agama
 |
| 5 | Pengadaan kegiatan Baca tulis Al Quran | Masih minimnya masyarakat yang bisa baca tulis Al Quran | 1. Masyarakat
 |
| 6 | Pengadaan buku keagamaan | Kurangnya buku bacaan  | 1. Warga
2. Pemdes
 |
| 7 | Pengadaan seragam pengajian | Masih banyak warga yang belum punya seragam pengajian | 1. Kelompok pengajian
2. Pemdes
 |
| 8 | Bantuan kelompok disabilitas | Kelompok disabilitas belum mempunyai wadah untuk organisasinya | 1. Kelompok disabilitas
2. Pemdes
 |
| 9 | Pelatihan karawitan | Kurangnya kesadaran tentang seni karawitan | 1. Warga
2. Pemdes
 |
| 10 | Pelatihan dan peralatan jahit | Kelompok jahit masih kekurangan pengetahuan dan peralatan | 1. Warga
2. Pemdes
 |
| 11 | Peringatan HUT RI | Perlunya memperingati HUT RI | 1. Warga
2. Pemdes
 |
| 12 | Pelatihan budidaya jamur | Kurangnya pengetahuan tentang budidaya jamur | 1. Warga
2. Pemdes
 |
| 13 | Pembangunan RTLH | Masih ada rumah tidak layak huni di sebagian dusun di Desa Jatisuko | 1. Swadaya tenaga
2. Lahan
3. Pemdes
 |
| 14 | Pembangunan jambanisasi | Masih ada rumah baru yang belum punya jamban | 1. Swadaya tenaga
2. lahan
 |
| 15 | Pengadaan kajang | Jika ada acara masih menyewa | 1. Warga
2. Pemdes
 |
| 16 | Pelatihan peningkatan hasil pertanian | Hasil pertanian belum maksimal | 1. Gapoktan
2. Pemdes
 |
| 17 | Pelatihan budidaya ternak sapi | Hasil ternak kurang maksimal | 1. Kelompok ternak
2. pemdes
 |
| **2.12** | **PKK** |  |  |
| 1 | Refresing Kader | Perlu diadakannya penyegaran bagi kader | * 1. kader PKK
 |
| 2 | Operasional PKK ditambah | Operasional PKK masih kurang | 1. kader PKK
2. Pemdes
 |
| 3 | Parenting | Kurangnya pengetahuan tentang pola asuh anak | 1. kader PKK
2. Pemdes
 |
| 4 | Pelatihan budidaya tanaman tabulapot | Kurangnya pengetahuan tentang budidaya tanaman tabulapot | 1. kader PKK
2. Pemdes
 |
| 5 | Pelatihan membuat kue | Kurangnya pengetahuan tentang cara membuat kue | 1. kader PKK
2. Pemdes
 |

* 1. **BIDANG PEMBERDAYAAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Penyertaan Modal BUMDES | Kurangnya modal BUMDES | 1. BUMDES
2. Pemdes
 |

* 1. **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, MENDESAK DESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Penanggulangan bencana alam | Di khawatirkan jika terjadi bencana | 1. Warga
2. pemdes
 |

**BAB V**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

**4.1. VISI DAN MISI**

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

 Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 ( enam ) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Jatisuko dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

**4.1.1 Visi Desa**

***“ MENJADIKAN DESA JATISUKO YANG MAJU DAN BERMARTABAT ”***

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Jatisuko, baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan Desa Jatisuko mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

**4.1.2 Misi**

|  |
| --- |
| 1. Meningkatkan peran dan kinerja lembaga dan

perangkatnya sesuai dengan tupoksinya  |
| 1. Meningkatkan pengelolaan aset desa untuk

peningkatan PAD |
| 1. Program swasembada air bersih
 |
| 1. Meningkatkan pengelolaan BUMDes untuk

kesejahteran masyarakat |
| 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 |
| 1. Membentuk dan mengelola badan ZIS (Zakat Infaq

dan Sodaqoh) untuk kesejahtaeraan masyarakat |

**4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakatiproses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW.Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

**4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

1. Arah Pengelolahan Pendapatan Desa
	* Pendapatan Desa bersumber APB Des dan Dana dari Pemerintah.
	* Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa Desa.
	* Pendapatan dari APBDes dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.
2. Arah Pengelolahan Belanja Desa
3. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
4. Intensif RT dan RW;
5. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
6. Tunjangan operasional BPD;
7. Program operasional Pemerintahan Desa;
8. Program Pelayanan Dasar;
9. Program pelayanan dasar infrastruktur;
10. Program kebutuhan primer pangan;
11. Program pelayanan dasar pendidikan;
12. Program pelayanan kesehatan;
13. Program kebutuhan primer Sandang;
14. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
16. Program Ekonomi produktif;
17. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
18. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
19. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

**4.2.2 Potensi Dan Masalah**

1. Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Jatisuko adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa adalah banyaknya lahan kosong yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

1. sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki desa Jatisuko adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

1. Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Jatisuko adalah banyaknya lembaga-lembaga yanga ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna , dan lani-lain.

1. Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Jatisuko adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian.

 Desa Jatisuko Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

1. Bidang Sarana Prasarana Fisik
	* + 1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
			2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
			3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
			4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa
2. Bidang Ekonomi
	* + - 1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
				2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
				3. Terbatasnya dana untuk modal
			1. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat
3. Bidang Sosial Budaya
	* + - 1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
				2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
4. Bidang Pemerintahan
	1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
	2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
	3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
	4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal
	5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
5. Bidang Kesehatan
	* 1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan ( PKD ) yang memadai
		2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
		3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
		4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
6. Bidang Kelembagaan
	1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
	2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
	3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
	4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
7. Bidang Kamtibmas
	* + 1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
			2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
			3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
8. Bidang Lingkungan Hidup
	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
	2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
	3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
	4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
9. Bidang Partisipasi Masyarakat
	* 1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
		2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kura
		3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
10. Bidang Pertanian
	* + 1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
			2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
			3. Kekurangan air pada musim kemarau
11. Bidang Hukum
	1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
	2. Penegakan hukum yang masih kurang
	3. Alergi terhadap aparat penegak hukum
12. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
13. Home Industri yang belum dikembangkan
14. Kesulitan dan penambahan modal
15. Bidang Pertanahan
	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
	2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

**4.2.3 Bidang dan Kegiatan Indikatif**

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

**4.2.4. Strategi Pencapaian**

1. Strategi

Program Desa Jatisuko dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

1. Menetapkan Desa Jatisuko sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan

 Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa.
2. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
4. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
6. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
7. Menetapkan prioritas pengembangan desa.
8. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
9. Pembangunan sarana dan prasarana umum
10. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

**BAB VI**

**PENUTUP**

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho­ sehingga semua program dapat terealisasi sesuai denganyang direncanakan.